

BAB I

PENDUHLUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan ekonomi menjadi tujuan dari semua negara begitu juga dengan Indonesia. Pembangunan Ekonomi adalah usaha dan kebijaksanaan yang akan dilakukan suatu negara dengan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Tri Widodo, 2006). Menurut Todaro (2006) pembangunan adalah merupakan proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemeberantasan kemiskinan yang absolut.

Salah satu realitas dari Pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan yaitu terjadinya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah dan antar kawasan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah (Mudrajat Kuncoro, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak

memerhatikan apakah pertumbuhan lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi (Dwi Suryanto, 2011).

Pemikiran Chenery *et al* dalam Nazara (2010) dan Soekarno (2011), empat proses terjadi bersamaan dengan meningkatnya pendapatan perkapita di suatu perekonomian, keempat proses tersebut adalah : (a) Proses akumulasi yaitu proses memperbesar kue ekonomi melalui penggunaan sumber daya untuk peningkatan kapasitas produksi di perekonomian. (b) Proses alokasi yang memberikan perubahan sistematis dalam komposisi permintaan dan produksi domestik, serta perdagangan internasional. Ketika pendapatan perkapita meningkat, proporsi permintaan masyarakat mulai bergeser dari produk pangan ke non-pangan. (c) Transisis kependudukan, dimana peningkatan pendapatan perkapita akan membawa perubahan dalam struktur penduduk. (d) Proses distribusi, distribusi terjadi antar kelompok masyarakat, diantara pemilik faktor produksi, dan juga terjadi antar daerah dan antar provinsi.

Pada era otonomi daerah, pembangunan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dimana kondisi dan potensi dari tiap daerah merupakan suatu modal dasar dan faktor dominan yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat, yang dapat didayagunakan untuk mencapai sasaran dan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dengan ini pemerintah daerah perlu langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam mengambil kebijakan yang mengarah pada perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Dan juga dibutuhkannya seluruh komponen masyarakat untuk turut andil dalam peningkatan

pertumbuhan ekonomi, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota berperan lebih dalam pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Jadi dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih adil dan lebih merata akan dicapai dengan lebih baik dan lebih cepat.

Menurut Todaro (2000) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian, hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Jadi, bagaimana kemampuan proporsi tenaga kerja yang dimiliki tiap daerah dapat dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif bagi daerah bersamaan dengan penggunaan akumulasi modal yang dimiliki tiap daerah.

Menurut Sjafrizal, 2012 dari fenomena Pertumbuhan Ekonomi yang pesat, memunculkan pertanyaan mengapa pada proses pembangunan dilaksanakan khususnya di negara sedang berkembang justru ketimpangan semakin meningkat? Hal ini dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang

berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang pada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial-budaya sehingga akibatnya ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah yang kondisinya lebih baik, sedangkan daerah terbelakang tidak mengalami kemajuan.

Ketimpangan ekonomi regional sendiri merupakan hal umum yang biasa terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab itu, tidak heran jika dalam suatu negara/daerah terdapat wilayah maju dan wilayah tebelakang.

Dari hasil penjelasan di atas, arti dari kegiatan atau cara-cara yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah yang dilakukan melalui belanja modal dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana investasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui belanja modal serta peran/proporsi tenaga kerja, dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Serta bagaimana cara pemerintah mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber dana dan modal yang dimilikinya. Semua akan dijabarkan dengan data dan realisasi belanja modal dan proporsi tenaga kerja di daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2002-2011. Dan akan diperlihatkan juga bagaimana realisasi belanja modal, dan data proporsi tenaga kerja di daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2002-2011 dalam mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan antar daerah di tingkat Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mengatasi Ketimpangan Pendapatan antar daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat, maka dapat ditempuh dengan cara meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dalam mengatasi Ketimpangan Pendapatan antar daerah, dimana faktor tersebut seperti : Belanja Modal, dan Tenaga Kerja . Dari uraian diatas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

- a) Seberapa besar pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan dalam mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat .

- b) Seberapa besar Pertumbuhan Ekonomi Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dalam mempengaruhi/menyebabkan Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan mengatasi Ketimpangan Pendapatan , adalah:

- a) Untuk menganalisis pengaruh variabel Belanja Modal, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
- b) Untuk menganalisis pengaruh variabel Belanja Modal, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan antar daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Kontribusi Empiris, untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang gambaran dari dampak

Belanja Modal, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

- b) Kontribusi Kebijakan, memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam memanfaatkan Belanja Modal dan Tenaga Kerja.
- c) Kontribusi Teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini .

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini diuraikan dalam 6 BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan .

BAB II : KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang uraian kerangka pemikiran dan kemudian pandangan-pandangan secara teoritis yang berkaitan dengan masalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, variabel dan pengukuran yang digunakan, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, spesifikasi model dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian Kabupaten/Kota Sumatera Barat, dalam hal ini mencakup variabel-variabel yang berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antara lain perkembangan Belanja Modal dan Tenaga Kerja.

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari tulisan yang menjelaskan penjabaran dari analisis data, hasil pengolahan data kemudian interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.